

ABSTRAK

Raka Ary Nugraha (1228010173): Penerapan *Robust Governance* Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (Sman) Di Wilayah Kota Bandung Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berpotensi mewujudkan kesetaraan hak memperoleh pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah reguler terdekat. Namun, kebijakan ini masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Penelitian ini berfokus pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa SMA dinilai telah memiliki tingkat kematangan yang memadai untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMA di Kota Bandung dalam konsep robust governance. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif memiliki ketahanan yang tangguh dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMAN Kota Bandung secara kumulatif terbukti memiliki robustness dimana kebijakan ini tidak mudah berubah walaupun menghadapi tantangan dalam setiap transisi kepemimpinan.

Kata Kunci: Robust Governance, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Kualitas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas Negeri.